**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan tentang Kesejahteraan Sosial**
2. **Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Permasalahan sosial yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia membawa beberapa dampak yang negatif bagi masyarakatnya, hal-hal tersebut tentunya akan mengganggu proses interaksi yang terjadi dan akan menyebabkan adanya perasaan yang kurang tentram bagi masyarakatnya. Oleh karena itu dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia sangatlah diperlukan peranan-peranan dari disiplin ilmu khususnya yang berkaitan dengan kemasyarakatan, salah satunya adalah ilmu kesejahteraan sosial. Diharapkan dengan adanya peranan-peranan tersebut kesejahteraan dan keberfungsian sosial masyarakat dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya sehingga dapat juga meningkatkan taraf hidup dalam melakukan interaksi sosial pada lingkungannya, sehingga dalam hal ini sangatlah jelas peranan penting dari ilmu kesejahteraan sosial.

Definisi kesejahteraan sosial menurut (Soeharto, 2009: 154) menyatakan “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksakan fungsi sosialnya”

Berdasarkan definisi tersebut, maka kesejahteraan sosial merupakan keadaan untuk memenuhi semua kebutuhan sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik tanpa adanya halangan apapun. Fungsi sosialnya tersebut dapat juga berupa sosialisasinya serta mobilitas dalam kesehariannya.

Definisi yang tidaklah jauh berbeda juga dikemukakan pada Pre-conference working for the 15th international conference of social welfare (sulistiati, 2004: 25)dalam Huda (2009: 73) bahwa **:**

Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup pula unsure kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka kesejahteraan sosial merupakan suatu usaha sosial yang terorganisir dan memiliki tujuan utama untuk dapat meningkatkan keberfungsian sosial dalam masyarakat yang didalamnya juga terdapat suatu kebijakan-kebijakan dan pelayanan-pelayanan yang dapat membantu masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf sosialnya mengenai pendapatan, pendidikan, sosial dan lain-lain. Definisi kesejahteraan sosial tentunya sangatlah beragam, namun pada intinya seluruh definisi kesejahteraan sosial tersebut merujuk pada keberfungsian sosial yang terjadi dalam upaya untuk dapat meningkatkan kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Salah satu definisi yang juga tidaklah jauh berbeda dengan defisini kesejahteraan sosial yang telah dijelaskan diatas adalah definisi kesejateraan sosial berdasarkan undang-undang No.6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial yang dikutip dalam Suharto (2014: 2) yang menyatakan bahwa :

Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Berdasarkan definisi tersebut, maka kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan dasar bagi setiap warga masyarakat baik dalam hal jasmani, rohani maupun sosial sehingga diharapkan apa yang diinginkan oleh masyrakat untuk dapat berinteraksi sosial dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan tanpa adanya suatu permasalahan yang dapat mengganggu dalam keberfungsian sosialnya.

1. **Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial selain merupakan suatu ilmu dibidang sosial yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat dan juga keberfungsian sosialnya, ternyata kesejahteraan sosial juga memiliki tujuan umum. Dikutip dalam Fahrudin (2012: 10) Tujuan kesejahteraan sosial adalah :

1) Untuk mencapai kehidupan yg sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

**3. Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat, tentunya juga memiliki fungsi-fungsi yang sangat berkaitan erat terhadap keberfungsian sosial dalam kehidupan. Selain itu kesejahteraan sosial juga memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan penyesuaian sosial dan relasi sosial sehingga diharapkan peranan-peranan sosial yang terganggu karena adanya perubahan dapat kembali sesuai dengan apa yang diinginkan dan keberfungsian sosial masyarakat dapat kembali normal. Dikutip dalam Fahrudin (2012: 12) Fungsi-fungsi dalam kesejahteraan sosial antara lain :

1) Fungsi pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.

2) Fungsi penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi). Pada fungsi ini partisipasi pelajar sangatlah berpengaruh hal ini dikarenakan dengan partisipasi yang tinggi dari para pelajar untuk dapat menggunakan bis sekolah gratis, tentunya sedikit demi sedikit diharapkan masalah kemacetan yang merupakan suatu permasalahan sosial dapat diatasi, dan juga masyarakat yang mendapatkan suatu permasalahan sosial karena adanya kemacetan dapat kembali berfungsi dengan baik dalam fungsi sosialnya.

3) Fungsi pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4) Fungsi penunjang (*supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. Fungsi penunjang dalam hal ini adalah adanya program bis sekolah gratis yang diharapkan dapat membantu menghilangkan permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat.

**4. Komponen Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting bagi siapapun yang mempelajarinya, ternyata kesejahteraan sosial juga memiliki beberapa komponen –komponen yang tidak kalah jauh penting. Komponen-komponen tersebut menjadi suatu pembeda antara kesejahteraan sosial dengan kegiatan-kegiatan lainnya, Dikutip dalam Fahrudin (2012: 16) komponen-komponen dalam kesejahteraan sosial antara lain :

1) Organisasi formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula.

2) Pendanaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat.

3) Tuntutan kebutuhan manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja, hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

4) Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesioan; berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematik, dan menggunakan metoda dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya

5) Kebijakan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan dan pengakhiran pelayanan. Pada permasalahan ini Pemerintah Kota Bandung selaku yang berwenang dalam membuat sautu kebijakan turut serta membantu dalam komponen-komponen kesejahteraan sosial, tentunya dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan yaitu program bis sekolah gratis yang diperuntukkan memberikan pelayanan kepada para pelajar di Kota Bandung.

6) Peran serta masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat. Peran serta masyarakat dalam hal ini adalah peran serta dari pelajar untuk dapat turut serta berpartisipasi dalam menggunakan bis sekolah gratis ini untuk pergi ataupun pulang sekolah.

7) Data dan informasi kesejahteraan sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

**5. Bidang – Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Dalam kesejahteraan sosial selain berfokus pada keberfungsian sosial yang terjadi di masyarakat, ternyata kesejahteraan sosial juga memiliki beberapa bidang-bidang pelayanan dalam usaha kesejahteraan sosial. Tentunya hal ini lebih menspesifikasi fokus-fokus pelayanan yang terdapat dalam ilmu kesejahteraan sosial, fokus-fokus pelayanan dari beberapa cakupan yang terdapat dalam kesejahteraan sosial juga saling terkait erat antara satu dengan yang lainnya. Cakupan-cakupan tersebut antara lain terdiri dari :

1) kesejahteraan anak dan keluarga

2) Kesejahteraan remaja dan generasi muda

3) kesejahteraan orang lanjut usia

4) pelayanan kesejahteraan sosial umum

5) pelayanan rekreasional

6) pelayanan sosial koreksional

7) pelayanan kesehatan mental

8) pelayanan sosial medis

9) pelayanan sosial bagi penyadang cacat

10) pelayanan sosial bagi wanita

11) pelayanan sosial perumahan dan lingkungan

**B. Tinjauan tentang Masalah Sosial**

**1. Pengertian Masalah Sosial**

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang di Asia, tentunya banyak juga permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Tentunya permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia dapat disebabkan oleh banyak hal, tentunya hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan sosial sehingga dapat mengganggu dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Kartono (1992; 1-2) dalam Huraerah (2008; 4), mendefinisikan masalah sosial adalah “Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai menganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan orang banyak”.

Berdasarkan definisi diatas bahwa masalah sosial yang terjadi akan berdampak pada terganggunya aktivitas ataupun yang lainnya dikarenakan satu dan lain hal yang menyebabkan tidak berjalannya mobilitas atau sosialisasi dengan normal sehingga merugikan bagi banyak orang dan mengganggu keberfungsian sosialnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan seorang pekerja sosial dan juga suatu kebijakan-kebijakan sosial yang dibentuk oleh pemerintah agar keberfungsian sosial yang sebelumnya terganggu dapat berjalan sebagaimana mestinya dan masalah-masalah sosial tersebut dapat teratasi. Definisi masalah sosial juga dikemukakan oleh Rubbington et al (1981) dalam bukunya *The Study Of Social Problem* yang dikutip oleh Rudito (2008: 44), dalam hal itu Rubbington mendefinisikan masalah sosial adalah :

“Sebuah situasi yang diduga bahwa situasi tersebut tidak cocok atau bertentangan dengan nilai-nilai sejumlah orang atau komuniti,dan orang dalam komuniti tersebut sepakat bahwa harus ada aksi yang dilakukan untuk merubah situasi tersebut”.

Definisi diatas menjelaskan bahwa masalah sosial merupakan suatu situasi yang memang tidak diharapkan orang atau komuniti, namun dalam kehidupan bermasyarakat masalah sosial tidaklah dapat terpisahkan begitu saja. Tentunya masyarakat haruslah memiliki cara untuk dapat mengatasi permasalahan sosial tersebut, salah satunya adalah dengan adanya aksi ataupun kegiatan untuk dapat merubah hal tersebut.

**2. Pandangan tentang Masalah Sosial**

Dalam masalah sosial terdapat 2 pandangan yang sangat berbeda, pandangan tersebut berasal dari persepsi yang dibedakan oleh kelas yang ada. Perbedaan persepsi tersebut tentunya menimbulkan pandangan yang berbeda antara keduanya. Pandangan tersebut yaitu :

1. Pandangan umum atau orang awam

Pada pandangan ini orang awam dan umum cenderung menanggapi masalah sosial sebagai suatu yang berkenaan langsung dengan sendi kehidupan dirinya selaku anggota komuniti.

1. Pandangan para ahli

Pada pandangan ini para ahli cenderung menanggapi masalah sosial terjadi dikarenakan adanya faktor lain yang mendukung sehingga terjadi suatu permasalahan sosial

**3. Klasifikasi Masalah Sosial Berdasarkan Sumbernya**

Masalah sosial timbul dikarenakan adanya nilai-nilai ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam setiap masalah sosial tentunya terdapat juga sumber-sumber permasalahan yang akan tentu menjadi suatu akar permasalahan sehingga menjadi suatu masalah sosial. Masalah sosial juga memiliki kualifikasi-kualifikasi seperti yang dikutip dalam Soekanto (2012: 314) Klasifikasi masalah sosial berdasarkan sumber-sumbernya, yaitu :

1. Ekonomis (contohnya adalah kemiskinan, pengangguran dan sebagainya)

2. Biologis (contohnya adalah penyakit)

3. Biopsikologis (contohnya adalah penyakit saraf, bunuh diri, disorganisasi jiwa)

4. Kebudayaan (contohnya adalah perceraian, kejahatan, kenakalan anak-anak, konflik rasial, dan keagamaan)

Berdasarkan klasifikasi-klasifikasi masalah sosial tersebut dapat dipahami bahwa masalah sosial memiliki berbagai macam klasifikasi-klasifikasi yang berdasarkan dengan berbagai sumber-sumber yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya hal tersebut menjadi suatu pembelajaran khususnya untuk pemerintah maupun warga Negara agar permasalahan sosial yang ada dapat diminimalisir.

**C. Tinjauan tentang Kebijakan Sosial**

**1. Pengertian Kebijakan Sosial**

Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah untuk dapat melayani keperluan ataupun kepentingan masyarakat. Dalam membuat suatu kebijakan sosial tentunya pemerintah tidak langsung dapat membuat suatu kebijakan dan diresmikan lalu dijalankan di lapangan, melainkan dalam membuat suatu kebijakan sosial yang memiliki tujuan untuk dapat memberikan pelayanan yang diinginkan kepada masyarakat, suatu kebijakan sosial yang dibuat tentulah harus dengan perhitungan yang matang, dan telah terencana sesiap mungkin baik konsep-konsepnya maupun hal-hal lainnya. Menurut Bessant, Watts, Dalton, dan Smith (2006; 4) dalam Suharto (2013; 10) kebijakan sosial adalah “apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya”. Berdasarkan definisi diatas kebijakan sosial merupakan salah satu langkah dari pemerintah guna dapat memberikan pelayanan-pelayanan dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga diharapkan dengan adanya kebijakan-kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah maka permasalahan sosial pun dapat segera teratasi. Dalam hal ini untuk dapat meningkatkan kualitas hidup manusia khususnya agar terhindar dari permasalahan sosial yang ada Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal ini para pelajar, yaitu adanya Bis Sekolah Gratis.

Definisi yang tidak jauh berbeda mengenai kebijakan sosial yang merupakan suatu kebijakan pemerintah dengan menyediakan pelayanan terhadap masyarakat juga dikemukakan oleh Marshall dalam Huda (2009: 85) yang menyatakan bahwa kebijakan sosial adalah “kebijakan pemerintah yang langsung terhadap kesejahteraan warga Negara melalui penyediaan pelayanan sosial dan bantuan keuangan”.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami dengan mudah bahwa kebijakan sosial merupakan suatu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tujuan agar menjadikan masyarakat ataupun warga Negara sejahtera dengan menggunakan cara-cara melalui penyedian pelayanan sosial dan juga bantuan dalam bentuk uang. Dari kedua definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya kebijakan sosial merupakan suatu bentuk pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat.

**2. Tujuan Kebijakan Sosial**

Berdasarkandefinisi dari kebijakan sosial yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikemukakan secara umum bahwa pada dasarnya kebijakan sosial bertujuan untuk dapat melayanin masyarakat dengan menggunakan pelayanan-pelayanan sosial, Lebih jelasnya dikemukakan oleh Suharto (2014: 111) bahwa tujuan dari kebijakan sosial adalah :

1. Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.
3. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural
4. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat kemanusiaan.
5. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilann sosial.

Berdasarkan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sosial memiliki tujuan untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pelayanan-pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehingga peranan-peranan sosial dalam lingkungannya juga dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.

**3. Ruang Lingkup Kebijakan Sosial**

Kebijakan sosial bukan hanya mengenai pelayanan-pelayanan sosial namun di dalam kebijakan sosial juga terdapat beberapa fokus ataupun metode yang dapat digunakan guna menunjang kebijakan sosial tersebut, Berdasarkan James Midgleym et,al, dalam *the handbook of social policy* (2000: 4) yang dikutip dalam Huda (2009: 89) bahwa kebijakan sosial mencakup dua aspek yaitu :

1. Pertama, program atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
2. Kedua, aspek wilayah akademik yang fokus kepada deskripsi, penjelasan dan evaluasi kebijakan.

Selain itu terdapat juga 3 metode yang telah dikenal umum yang dapat digunakan dalam kebijakan sosial untuk meningkakan kesejahteraan sosial, yaitu :

1. Program pelayanan sosial yang secara langsung dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Metode ini paling umum digunakan karena mempunyai formula yang jelas untuk mengatasi masalah sosial.
2. Upaya utnuk menyejahterakan warga Negara dilakukan melalui produk perundang-undangan (*statutory regulation*).
3. Peningkatan kesejahteraan juga dapat dilakukan melalui sistem pajak. Pemgunaan sistm pajak ini dikenal degan istilah kesejahteraan fiscal. Di Indonesia dana pembangunan sosial juga ada yang berasal dari dana pajak misalnya untuk anggaran pendidikan.

**4. Kategori dalam Kebijakan Sosial**

Kebijakan sosial dalam memberikan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat memiliki beberapa kategori yang berkaitan dengan garis besar kebijakan sosial. Menurut Midgley (2000) dalam Suharto (2008: 11) Dalam garis besar kebijakan sosial diwujudkam dalam 3 kategori, antara lain :

1. Peraturan dan perundang-undangan

Pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan public yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar mengadopsi ketetapan-ketetapan yang berdampak langsung pada kesejahteraan.

1. Program pelayanan sosial

Sebagaian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial dan bimbingan sosial (konseling, advokasi, pendampingan).

1. Sistem perpajakan.

Dikenal sebagai kesejahteraan fiscal. Selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak juga sekaligus merupakan instrument kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil. Di Negara-negara maju, bantuan public (*public assistance*) dan asuransi sosial (*social insurance*) adalah dua bentuk jaminan sosial (*social security*) yang dana nya sebagian berasal dari pajak.

Berdasarkan kebijakan sosial yang telah dijelaskan tersebut, dalam penelitian ini kebijakan sosial yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung untuk dapat turut serta mengurangi kemacetan di Kota Bandung adalah kebijakan yang berupa bantuan publik yaitu berupa program bis sekolah gratis yang pada praktiknya menyasar bagi para pelajar agar dapat meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih menggunakan bis sekolah atau angkutan umum sehingga diharapkan kemacetan yang terjadi di Kota Bandung juga dapat diminimalisir tentunya pada jam-jam berangkat sekolah dan pulang sekolah. Selain itu dengan menggunakan bis sekolah tersebut, Pemerintah Kota Bandung juga sekaligus ingin mengkampanyekan dan juga memberi edukasi tentang tertib berlalu lintas dan juga keselamatan bertransportasi.

**D. Tinjauan tentang Pelayanan Sosial**

**1. Pengertian pelayanan sosial**

Pelayanan sosial merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini kepada masyarakat melalui suatu pembentukan kebijakan sosial. Pelayanan sosial yang dibutuhkan di Indonesia pada umumnya haruslah memiliki tingkat keseriusan yang tinggi dari aparatur pemerintahan itu sendiri dalam setiap pelayanan yang diberikannya guna dapat membantu dalam menyelesaikan setiap permasalahan sosial yang ada, sehingga penyelesaian masalah dapat berlangsung secara cepat dan tepat.

Definisi pelayanan sosial menurut (Adi, 2015: 107) menyatakan “pelayanan sosial adalah suatu program ataupun kegiatan yang didesain secara konkret untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dapat ditunjukkan pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas, ataupun komunitas sebagai suatu kesatuan.”

Berdasarkan definisi tersebut, maka pelayanan sosial merupakan kegiatan yang bertujuan untuk dapat menjawab permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat sehingga diharapkan keberfungsian sosial masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan taraf kehidupan akan semakin meningkat lebih baik lagi. Setiap pelaksanaan pelayanan sosial pun dibutuhkan juga peran dari seorang pekerja sosial, peran pekerja sosial dalam hal ini guna turut membantu masyarakat melalui program pelayanan-pelayanan sosial tersebut untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Selain peran dari seorang pekerja sosial tentunya peran pemerintah dalam hal ini juga sangatlah penting karena oleh pemerintahlah suatu kebijakan sosial dibentuk dan sebelumnya tentu sudah melalui proses yang panjang sehingga menghasilkan suatu bentuk kebijakan sosial yang berupa pemberian pelayanan sosial kepada masyarakat. Definisi yang tidak jauh berbeda mengenai pelayanan sosial juga dikemukakan oleh Fadhil (1986:50) dalam Sutaat (2012: 8) menyatakan bahwa :

Pelayanan sosial bukan hanya sebagai usaha memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosial individu dan keluarga melainkan juga sebagai usaha untuk menjamin berfungsinya kolektivitas seperti kelompok-kelompok sosial, organisasi-organisasi serta masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas, maka pelayanan sosial adalah suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai suatu usaha untuk dapat memulihkan dan juga meningkatkan kemampuan sosial masyarakat sehingga diharapkan dengan adanya pelayanan sosial maka interaksi dan proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

**2. Jenis Pelayanan Sosial**

Kebijakan sosial yang diberikan pemerintah dengan bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat tentunya beragam bentuk dan jenis. Namun, apapun jenis dan bentuk dari pelayanan sosial tersebut tentunya tujuan dari pelayanan sosial tersebut tetaplah sama yaitu untuk dapat melayani masyarakat sehingga diharapkan dengan adanya pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat fungsi sosial yang ada dalam masyarakat dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu hambatan ataupun permasalahan yang dapat mengganggu. Pelayanan sosial menurut Alfred j.khan (dalam soetarso, 1993: 32-33), pelayanan sosial dibedakan dalam :

1. Pelayanan sosial yang sangat rumit dan komprehensif sehingga sulit ditentukan identitasnya. Pelayanan ini antara lain pendidiakn, bantuan sosial dalam bentuk uang oleh pemerintah, perawatan medis dan perumahan rakyat.

2. Pelayanan sosial yang jelas ruang lingkupnya walaupun selalu mengalami perubahan. Pelayanan ini dapat berdiri sendiri, misalnya kesejahteraan anak dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga dapat merupakan suatu bagian dari lembaga-lembaga lainnya, misalnya pekerjaan sosial di sekolah, pekerjaan sosial medis, pekerjaan sosial dalam perumahan rakyat dan pekerjaan sosial dalam industri.

**3. Bidang Pelayanan Sosial**

Menurut Suharto (2013: 14) dalam suatu pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat setidaknya terdapat 5 bidang pelayanan sosial, pelayanan-pelayanan sosial itu antara lain :

1. Jaminan Sosial

Merupakan sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaaan penghasilan

1. Pelayanan Perumahan

Jaminan yang disediakan oleh pemerintah ini adalah perumahan public atau perumahan sosial. Selain menyediakan rusunawa atau RSS.

1. Kesehatan

Pelayanan kesehatan publik juga sebagaian besar diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Skema pelayanan kesehatan publik biasanya erat kaitannya dengan sistem jaminan sosial, terutama asuransi sosial, karena sebagaian pelayanannya menyangkut atau berbentuk asuransi kesehatan.

1. Pendidikan

Negara memiliki tiga kewajiban penting dalam bidang pendidikan. Pertama, sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, akademik dan universitas. Kedua, sebagai regulator atau pengatur penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta maupun lembaga-lembaga non formal. Ketiga, fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya penyedia skema-skema beasiswa dan tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswa-siswa yang beprestasi dan atau tidak mampu.

1. Pelayanan sosial personal

Pelayanan ini menunjuk pada berbagai bentuk perawatan sosial diluar pelayanan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial. Dalam garis besar pelayanan ini mencakup tiga jenis :

1. Perawatan anak
2. Perawatan masyarakat, dan
3. Perawatan peradilan criminal

Berdasarkan pelayanan sosial yang telah dijelaskan tersebut, dalam penelitian ini pelayanan sosial yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung merupakan adanya suatu kebijakan mengenai program bis sekolah gratis. Program bis sekolah gratis ini merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk para pelajar SD, SMP, SMA, SMK & Sederajat. Tentunya hal ini diharapkan dapat disambut dengan baik oleh para pelajar dan juga berantusias untuk dapat turut serta dalam berpartisipasi dalam memanfaatkan fasilitas bis sekolah gratis yang telah di berikan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui suatu kebijakannya. Penyediaan pelayanan bis sekolah gratis di Kota Bandung ini juga merupakan suatu kebijakan Pemerintah Kota Bandung untuk dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di Kota Bandung khususnya pada jam-jam berangkat sekolah dan sepulang sekolah selain itu hal ini juga diharapkan dapat menekan angka kecelakaan kendaraan bermotor khususnya pada pelajar di Kota Bandung.

**E. Tinjauan tentang Intervensi Pekerjaan Sosial**

**1. Pengertian Pekerjaan Sosial**

Kesejahteraan sosial pada dasarnya memiliki tujuan utama yang dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami yakni berfokus untuk dapat mengembalikan keadaan keberfungsian sosial pada individu, kelompok, maupun masyarakat. Namun, untuk dapat mewujudkan hal tersebut tentunya sangatlah dibutuhkan bantuan dari tenaga professional yang dapat turut serta membantu dalam mewujudkan kondisi keberfungsian sosial tersebut. Tenaga professional yang dapat membantu menangani dan mewujudkan hal tersebut adalah seorang pekerja sosial. Menurut Zastrow (1999) dalam Suharto (2009: 1) Pekerjaan sosial adalah:

Aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Profesi pekerjaan sosial sesuai dengan pengertian di atas dalam melakukan pertolongan yaitu dalam bentuk pelayanan sosial yang didasari oleh kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skill*) dan kerangka nilai (*body of value*) yang secara integratif membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial dengan menurut sertakan persepsi dan partisipasi pada klien. Definisi yang tidak jauh berbeda mengenai Pekerjaan sosial juga terdapat menurut IMFS (2000: 5) dalam Suharto (2014: 24) pekerjaan sosial adalah :

Suatu profesi yang mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat, menggunakan teori-peori perilaku manusia dan sistem sitem sosialm pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial.

Berdasarkan definisi tersebut, maka pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang memiliki tujuan untuk dapat memecahkan permasalahan sosial sehingga keberfungsian sosial dapat terwujud baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat tentunya dengan menggunakan teori-teori yang telah dikuasai dan juga menggunakan prinsip-prinsip yang berasaskan hak asasi manusia, sehingga dalam setiap penangannya diharapkan dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan sosial yang ada.

**2. Tujuan Intervensi Pekerjaan Sosial**

Berdasarkan definisi dari pekerjaan sosial yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dikemukakan secara umum bahwa pada dasarnya pekerjaan sosial bertujuan untuk dapat memberikan bantuan dalam menangani permasalahan sosial yang ada dan juga turut serta membantu mengembalikan keberfungsian sosial yang sebelumnya terganggu dapat kembali seperti semula. Menurut *The National Association Of Social Workers* (NASW) dalam Huda (2009: 15) awalnya pekerja sosial mempunyai 4 tujuan utama, namun belakangan *The Council On Social Work Education* menambah 2 tujuan pekerjaan sosial sehingga menjadi 6, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya, menanggulangi dan secara efektif dapat menjalankan fungsi sosialnya.
2. Menghubungkan klien dengan jaringan sumber yang dibutuhkan.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial dalam pelayanannya agar berjalan secara efektif.
4. Mendorong terciptanya keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial yang berpihak.
5. Memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan mendorong kesejahteraan sosial maupun ekonomi.
6. Mengembangkan dan melakukan uji keterampilan atau pengetahuan professional.

Berdasarkan tujuan pekerjaaan sosial tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya-upaya menyelesaikan permasalahan sosial dan juga dapat memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang ada untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya dan ekonominya dengan menggunakan pengetahuan-pengetahuan professionalnya.

Usaha yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk dapat mencapai suatu tujuan yang sesuai yaitu untuk dapat memecahkan suatu permasalahan sosial dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berinteraksi dengan orang lain maupun dengan melakukan pemberdayakan kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan dalam hal kesejahteraan sosial maupun ekonomi tentunya merupakan salah satu upaya yang digunakan agar tingkat kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat dapat sesuai dengan apa yang diharapakan dan juga keberfungsian sosial yang ada dalam masyarakat dapat berjalan dengan sesuai seharusnya sehingga tidak ada suatu permasalahan sosial yang akan dapat menyebabkan terganggunya keberfungsian sosial yang terjadi.

Pekerja sosial dalam hal ini memandang bahwa masalah sosial merupakan suatu permasalahan yang dapat menganggu keberfungsian sosial dalam masyarakat sehingga dapat dipastikan masalah sosial merupakan suatu masalah yang sangat utama yang haruslah diselesaikan oleh pekerja sosial dan juga melalui kerja sama dengan masyarakat, pemerintah ataupun institusi terkait. Seperti dalam kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang memberikan pelayanan bis sekolah gratis kepada para pelajar di Kota Bandung ini mendorong pelajar untuk dapat bersama-sama mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sehingga diharapkan masalah sosial yang berupa kemacetan dapat teratasi sedikit demi sedikit khususnya pada jam-jam sibuk. Dengan banyaknya para pelajar yang berpartisipasi dalam menggunakan bis sekolah gratis ini di bandung tentunya diharapkan kemacetan yang merupakan suatu permasalahan sosial di beberapa kota-kota besar yang terjadi salah satunya di Bandung dapat lebih teratasi, tentunya hal ini juga merupakan salah satu cara dari Pemerintah Kota Bandung untuk dapat menekan angka kemacetan yang terjadi di Kota Bandung, peran pekerja sosial sebagai profesi salah satunya dalam hal ini adalah turut serta meningkatkan kinerja lembaga-lembaga dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan pelayanannya agar berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan dari suatu kebijakan tersebut.

## Fokus Intervensi Pekerja Sosial

Berdasarkan dari definisi pekerja sosial yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dipahami bahwa pekerja sosial merupakan suatu profesi yang memiliki tujuan untuk dapat mencegah dan mengatasi suatu permasalahan sosial yang ada dan juga dapat mengembalikan keberfungsian sosial yang terganggu akibat dari adanya suatu permasalahan sosial yang terjadi. Pekerja sosial juga tidak hanya menangani permasalahan yang berkaitan dengan individu, namun juga mengenai permasalahan sosial yang terjadi di ruang lingkup kelompok, ataupun masyarakat. Selain itu, pekerja sosial juga memiliki fokus intervensinya sendiri dalam memberikan pertolongannya. Menurut Iskandar dalam Suharto (2009: 5) Fokus intervensi pekerja sosial adalah:

Fokus intervensi pekerja sosial yang berhubungan dengan kemampuan pekerja sosial untuk memusatkan perhatiannya, baik terhadap usaha klien melihat aspek penting dari situasi tersebut, maupun memegang teguh beberapa kesimpulan dari fokus tersebut atau kemajuan yang telah dicapai. Hal ini berarti bahwa pekerja sosial harus dapat memahami satu aspek masalah atau alternatif pemecahannya.

Berdasarkan definisi tersebut maka fokus intervensi pekerja sosial merupakan suatu hal yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial untuk memusatkan suatu perhatiannya kepada klien dengan memahami aspek-aspek yang terjadi dalam suatu permasalahan sehingga dapat mengambil suatu cara ataupun keputusan untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan tersebut.

Intervensi yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam persepsi pelajar tentang bis sekolah dengan partisipasinya ini adalah turut serta membantu pemerintah yang telah membuat kebijakan tentang bis sekolah ini melakukan pengorganisasian dan pengembangan pelayanan terhadap program bis sekolah sehingga diharapkan partisipasi dari para pelajar akan semakin tinggi untuk dapat menggunakan dan berpartisipasi dalam penggunaan bis sekolah. Diharapkan dari tingginya partisipasi pelajar dalam penggunaan bis sekolah tingkat kemacetan yang merupakan suatu permasalahan sosial di Kota Bandung semakin lama akan semakin menurun, untuk itu dapat dipahami bahwa dalam hal ini pekerja sosial juga turut serta bersama-sama dengan Pemerintah Kota Bandung selaku pembuat kebijakan yang berupa pelayanan bis sekolah kepada pelajar memiliki tujuan khusus yaitu menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi yang berupa kemacetan dengan terus memberikan pelayanan-pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh warga Kota Bandung dalam hal ini khususnya para pelajar.

Peran dari seorang pekerja sosial dalam hal ini bukan semata-mata hanya menjadi seorang *broker* yang membantu menghubungkan antara pemerintah sebagai pemberi layanan dan juga masyarakat dalam hal ini pelajar yang menerima pelayanan saja, tetapi juga dapat turut serta membantu dengan menjadi seorang *educator* yang dapat melakukan dan memberikan informasi-informasi kepada para pelajar agar dapat turut serta berpartisipasi dalam memanfaatkan fasilitas bis sekolah gratis yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung, sehingga diharapkan tingkat partisipasi pelajar juga akan meningkat seiring dengan informasi-informasi.

Pekerja sosial juga dapat berperan yang bersifatnya fasilitatif yaitu dengan memberikan semangat ataupun motivasi kepada para pelajar untuk dapat menggunakan bis sekolah gratis sehingga dengan menggunakan bis sekolah gratis tersebut diharapkan kemacetan yang terjadi di Kota Bandung dapat ditekan khususnya pada jam-jam sibuk. Diharapkan dari pemahaman para pelajar mengenai program bis sekolah gratis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung beserta tujuan-tujuan dan alasannya, para pelajar dapat memiliki persepsi yang tinggi untuk dapat berpartisipasi dalam menggunakan bis sekolah gratis pada saat pergi dan pulang sekolah dan dapat turut serta mengajak teman-teman sekolahnya untuk ikut turut serta dalam memanfaatkan fasilitas bis sekolah gratis tersebut.

**4. Metode Intervensi Pekerjaan Sosial**

Setiap penanganan yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial tentunya menggunakan pengetahuan-pengetahuan dan ilmu yang telah dimiliki dan juga secara professional dalam setiap penanganannya. Bidang garap pekerjaan sosial mencakup masalah sosial yang terjadi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Tentunya dalam hal ini seorang pekerja sosial juga harus dapat menepatkan dirinya karena dalam setiap penanganan yang diberikan baik kepada individu, kelompok, ataupun masyarakat tentunya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Huda (2009: 18) Atas cangkupannya yang berbeda ini pekerjaan sosial terbagi pada 3 level, yaitu :

1. Mikro (individu)

Pada level mikro ini penanganan yang diberikan lebih dikenal dengan casework (terapi perseorangan/terapi klinis)

1. Mezzo (keluarga dan kelompok kecil)

Pada level mezzo ini penanganan yang diberikan lebih dikenal dengan group work (terapi kelompok) dan family therapy (terapi keluaraga)

1. Makro (organisasi atau masyarakat)

Pada level makro ini penanganan yang diberikan lebih dikenal dengan community development (pengembangan masyarakat) atau policy analysis (analisis kebijakan)

Berdasarkan metode intervensi pekerja sosial tersebut maka dalam hal ini pekerja sosial menggunakan level mezzo karena pada kebijakan bis sekolah gratis ini memiliki subjek yaitu para pelajar sekolah yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam memanfaatkan fasilitas bis sekolah gratis yang merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung. Diharapkan dengan partisipasi yang tinggi dari para pelajar sekolah yang sebelumnya telkah memiliki persepsi yang tinggi juga akan manfaat dan tujuan dari program bis sekolah gratis ini diharapkan dapat sedikit menekan kemacetan yang terjadi di Kota Bandung.

Tujuan utama pekerja sosial dalam strategi mezzo ini yaitu memberikan motivasi-motivasi dan juga informasi kepada para pelajar mengenai bis sekolah gratis ini tentunya dengan bekerja sama dengan pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan sosial yang berupa kemacetan yang ada di Kota Bandung, selaitu pekerja sosial juga menjadi penghubung antara pihak pelajar dan juga pemerintah mengenai program bis sekolah sehingga diharapkan pekerja sosial dapat menjadi penghubung yang dapat turut serta memberikan masukan-masukan guna menjadikan program bis sekolah gratis di Kota Bandung ini semakin lebih baik dan juga bermanfaat.

**6. Model Pertolongan Pekerjaan Sosial**

Selain strategi dan metode pekerjaan sosial yang sangatlah penting untuk dapat membantu menyelesaikan suatu permasalahan sosial, model pertolongan yang digunakan juga sangatlah penting secara paradigmatic model pertolongan pekerjaan sosial sangat tergantung atau dipengaruhi oleh beroperasinya 5c, yang merupakan kepanjangan dari concept, commitment, capability, connection, dan communication dalam proses dan praktik pekerjaan sosial. Menurut Suharto (2014: 30) untuk lebih jelasnya 5c dijelaskan secara rinci, yaitu :

1. *Concept*

Menunjuk pada perumusan konsep-konsep pekerjaan sosial yang akan dijadikan *focus of inquiry* secara ringkas, menarik dan jelas.

1. *Commitment*

Penerimaan secara konsisten terhadap konsep yang telah didefinisikan dan akan digunakan sebagai pisau analisi.

1. *Capability*

Kemampuan atau keahlian dalam mengaplikasikan konsep.

1. *Connection*

Koneksi atau jaringan dengan mana praktik pekerjaan sosial beroperasim baik dengan teman sejawat dalam bingkai asosiasi profesi lain secara teamwork.

1. *Communication*

Mengkomunikasikan setiap hasil praktik dalam bentuk jurnal, buku. Bagi masyarakat modern, publikasi tertulis merupakan dinamika sentral dan pendefinisi kemajuan peradaban.

**7. Nilai dan Kode Etik dalam Pekerjaan Sosial**

Dalam setiap profesi tentunya memiliki kode etik dan juga nilai-nilai yang ada. Hal tersebut tentulah sangat diperlukan agar suatu profesi tidak keluar dari garis-garis yang telah ditentukan dan juga tetap pada koridor yang seharusnya. Hal tersebut tidaklah terkecuali pada profesi pekerjaan sosial, menurut Reamer (1999: 26) dalam Huda (2009: 143) Secara umum bentuk nilai yang dapat dinukilkan dari kode etik NASW (*National Association Of Social Worker*) antara lain :

1. Pelayanan

Prinsip etiknya adalah pekerja sosial harus mengutamakan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan memusatkan pada permasalahan sosial.

1. Keadilan sosial

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial wajib untuk menentang ketidakadilan sosial. Ujuan inti pekerjaan sosial adalah menuju perubahan sosial yang lebih humanis dan mengarah kepada kesejahteraan sosial.

1. Harkat dan martabat seseorang

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial menghormati harkat dan martabat seseorang.

1. Mementingkan hubungan kemanusiaan

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial mengakui dan mengutamakan hubungan kemanusiaan.

1. Integritas

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial harus mempunyai perilaku yang dapat dipercaya.

1. Kompetensi

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial harus mempraktikkan keahlian profesionalismenya dalam proses pertolongan yang dilakukan.

**8. Faktor Penyebab Kurang Populernya Profesi Pekerja Sosial**

Berbagai macam profesi tumbuh dan berkembang di Indonesia, salah satunya pekerja sosial. Namun, masih sangatlah banyak masyarakat Indonesia yang mengenal profesi pekerjaan sosial. Padahal, dalam praktiknya pekerja sosial sangatlah dekat dengan masyarakat. Hal ini dapat dipahami sebab ilmu ini lahir dan berkembang di barat. Tetapi bukan berarti pekerja sosial tidak relevan dikembangkan di Indonesia, sebab fokus kajian pekerjaan sosial adalah membantu orang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami kesulitan. Menurut Huda (2009: 4) Ada banyak faktor yang menyebabkan kurang populernya profesi pekerjaan sosial, antara lain :

1. Istilah yang dipakai tidak spesifik dan kurang tegas. Istilah yang spesifik dan tegas ditunjukkan misalnya pada profesi dokter atau guru, tetapi pekerja sosial justru identik dengan kegiatan skarela dan tidak professional.
2. Menyangkut stigma, pekerja sosial identik dengan pekerjaan sukarela, tidak dibayar, sehingga muncul kesan tidak profsional. Akibatnya profesi ini kurang dihargai dan tentu saja tidak banyak diminati.
3. Profesi ini dalam praktiknya tergantikan oleh profesi lain. Misalnya di masyarakat yang masih menjunjung tinggi suatu adat, profesi ini diperankan oleh tokoh-tokoh adat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapatlah diambil kesimpulan bahwasannya profesi pekerja sosial sebenarnya merupakan profesi yang sangatlah penting khususnya di masyarakat, namun kurangnya pengetahuan ataupun informasi mengenai profesi pekerja sosial membuat masyarakat tidak begitu tertarik untuk mencari tahu mengenai profesi tersebut, hal ini tentu sangatlah berbeda dengan Negara barat. Pekerja sosial di Negara barat telah mempunyai bagian sendiri dalam masyarakat tentunya hal ini sangatlah berbanding terbalik yang terjadi di Negara Indonesia, memang tidak bisa disalahkan juga kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya informasi yang ada mengenai profesi ini menyebabkan banyak yang mendefinisikan pekerja sosial merupakan profesi seorang relawan, yang dalam artian hanya turut membantu dengan tenaga dan juga tanpa mendapatkan pendapatan, tentunya jika dilihat secara rinci hal ini sangatlah berbeda, pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang dalam setiap penangannya menggunakan metode-metode maupun keilmuan-keilmuan yang telah dipelajarinya dan tentunya profesi ini pun mendapatkan dukungan dan juga pendapatan yang tidaklah sedikit.

**F. Tinjauan tentang Persepsi**

**1. Definisi Persepsi**

Setiap orang tentunya memiliki cara pandang maupun pemikiran yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Cara pandang dan pemikiran tersebutlah yang merupakan suatu keunikan tersendiri karena dengan banyaknya cara pandang dan juga pemikiran tentunya akan banyak juga pengetahuan-pengetahuan ataupun informasi yang akan didapatkan oleh setiap orang. Pemikiran dan juga cara pandang bisa juga disebut dengan persepsi.Menurut Rakhmat (2015; 50) persepsi adalah “Pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”.

Berdasarkan definisi persepsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu pengalaman di dalam kehidupan sehari-hari mengenai objek, peristiwa atau pun hubungan dengan cara menyimpulkan informasi dalam pemikiran sehingga mengahasilkan suatu pemahaman yang dapat menggerakan pemikiran tersebut untuk melaksanakan ataupun berpartisipasi terhadap stimulus yang didapat.

**2. Hal-Hal yang Menyebabkan Perbedaan Persepsi**

Setiap manusia tentunya memiliki pola pemikiran dan juga karakteristik yang berbeda, hal itulah yang membedakan antara manusia dengan lainnya. Hal tersebut tentulah menjadi suatu keunikan tersendiri yang ada dalam diri manusia. Pola pemikiran yang berbeda antara seseorang dengan yang lainnya tentunya merupakan salah satu penyeebab adanya suatu perbedaan pada saat mengemukakan suatu pendapat ataupun persepsi. Menurut Sarwono (2000: 43) Perbedaan persepsi dapat disebabkan oleh hal-hal dibawah ini :

1. Perhatian

Perbedaan fokus antara satu orang dengan orang lainnya, menyebabkan perbedaan persepsi anatara mereka.

1. Set

Harapan seseorang akan rangsang yang akan timbul.

1. Kebutuhan

Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang, akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.

1. Sistem nilai

Sistem nilai yang berlaku dalam satu masyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi.

1. Ciri kepribadian

Ciri kepribadian akan mempengaruhi juga persepsi

1. Gangguan kejiwaan

Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yg disebut halusinasi. Berbeda dari ilusi, halusinasi bersifat individual, jadi hanya dialami oleh penderita yang bersangkutan saja.

Berdasarkan dari penyebab-penyebab perbedaan persepsi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan persepsi merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi, hal ini dikarenakan setiap orang memiliki pemikirannya yang berbeda dengan yang lainnya, tentunya hal tersebut tidaklah menjadi suatu hal yang harus didebatkan karena sudah sepantasnya setiap orang memiliki pendapat dan persepsi masing-masing dan perbedaan dalam memberikan suatu pendapat atau pandangan itu merupakan suatu hal yang wajar, selayaknya dapat disikapi dengan baik oleh masing-masing orang.

**3. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Persepsi**

Selain penyebab-penyebab yang dapat menyebabkan persepsi berbeda-beda, terdapat juga faktor-faktor yang berperan dalam persepsi. Tentunya dalam hal ini faktor-faktor yang berperan dalam persepsi merupakan suatu faktor yang dimiliki oleh semua orang, namun tetap pada saat persepsi tersebut menjadi suatu pendapat ataupun pandangan akan terjadi perbedaan-perbedaan terhadap suatu hal yang dibahas. Menurut Walgito (2005: 101) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi antara lain :

1. Objek yg dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsim tetapi jufa dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

1. Alat indra, syaraf dan pusat susunan syaraf

Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran.

1. Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian yaitu merupakan langkah pertama seabagi suatu persiapan dalam reangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada Sesutu atau sekumpulan objek.

1. **Objek Persepsi**

Persepsi dari setiap orang tentunya akan berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya, hal ini dapat berbeda karena adanya faktor-faktor perbedaan yang telah dijelaskan sebelumnya, tentunya faktor perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mungkin ada jika tidak adanya faktor objek yang akan di persepsi oleh banyak orang. Objek yang dapat dipersepsi sangatlah banyak, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Manusia itu sendiri dapat menjadi objek perpsesi, orang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai objek persepsi, ini yang disebut sebagai persepsi diri atau *self-perception*. Karena sangat banyaknya objek yang dapat dipersepsi, maka pada umunya objek persepsi diklasifikasikan. Menurut Walgito (2005: 108) Objek persepsi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Objek yang non manusia

Persepsi yang berobjekkan non manusia, hal ini sering disebut sebagai *non social perception* atau juga disebut sebagai *things perception*.

1. Objek manusia

Objek persepsi yg berwujud manusia ini disebut *person perception* atau ada juga yang menyebutnya sebagai *social perception*.

Berdasarkan objek persepsi tersebut, maka dapat dipahami persepsi juga tidaklah bisa terlepas dari adanya suatu objek yang diamati sehingga dari pengamatan suatu objek tersebut menghasilkan suatu persepsi atau pandangan yang pada setiap memiliki persepsi yang berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Berdasarkan objeknya persepsi pun dibedakan atas persepsi non manusia dan manusia. Pada persepsi non manusia dapat dipahami bahwasanya persepsi ini dapat mengenai suatu situasi ataupun mengenai suatu pemikiran. Sedangkan pada objek manusia persepsi ini mengenai orang dalam individu, kelompok, maupun dalam masyarakat.

**5. Hukum-Hukum dalam Persepsi**

Persepsi merupakan suatu pemikiran yang sudah pasti ada di setiap orang, oleh karena itu tentunya hal ini menjadi suatu hal yang penting karena sangatlah perlu persepsi yang tepat dan juga pemikiran yang jernih untuk dapat menghasilkan suatu persepsi yang baik. Dalam persepsi bukan hanya objeknya saja yang jadi perhatian, melainkan juga terdapat hukum-hukum dalam persepsi. Menurut Werteimer dkk dalam Walgito (2005: 106) mengenai penelitian-penelitian secara eksperimental yang telah dilakukannya dalam persepsi sehingga menemukan beberapa hukum dalam persepsi. Hukum-hukum persepsi menurut teori gestalt adalah sebagai berikut :

1. Hukum Pragnanz

Menurut hukum ini apa yang dipersepsi itu adalah penuh arti, suatu kebulatan yang mempunyai arti penuh, meaningful. Hukum ini oleh kaums gestalt dipandang sebagai hukum yang pokok.

1. Hukum Figure-Ground

Dalam persepsi dikemukakan adanya 2 bagian dalam *perceptual field*, yaitu figure yang merupakan bagian yang dominan dan merupaan fokus perhatian, dan ground yang melatarbelakangi atau melengkapi. Kalau individu mengadakan persepsi sesuatu, apa yang tidak menjadi fokus dalam persepsi itu akan menjadi latar belakang atau groundnya.

1. Hukum Kedekatan

Hukum ini menyatakan bahwa apabila stimulus itu saling berdekatan satu dengan yang lainnya, akan adanya kecenderungan untuk dipersepsi sebagai suatu keseluruhan atau gestalt.

1. Hukum Kesamaan

Hukum ini menyatakan bahwa stimulus atau objek yang sama, mempunyai kecenderungan untuk dipersepsi sebagai suatu kesatuan atau sebagai suatu gestalt.

1. Hukum Kontinuitas

Hukum ini menyatakan bahwa stimulus yang mempunyai kontinuitas satu dengan yang lain, akan terlihat dari ground dan akan dipersepsi sebagai suatu kesatuan atau keseluruhan.

1. Hukum Kelengkapan atau Ketertutupan

Hukum ini menyatakan bahwa dalam persepsi adanya kecenderungan orang mempersepsi sesuatu yang kurang lengkap menjadi lengkap sehingga menjadi sesuatu yang penuh arti atau berarti.

**G. Tinjauan tentang Partisipasi**

**1. Pengertian Partisipasi**

Setiap manusia tentunya kewenangan untuk dapat melakukan kegiatan yang mereka inginkan. Namun, dibalik kewenangan tersebut tentunya mereka haruslah diiringi dengan persepsi yang baik dan juga sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing setiap orang haruslah memikirkan juga mengenai dampaknya, tentunya sangatlah perlu persepsi yang baik untuk dapat mendorong dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga tidak ada dampak yang buruk yang akan diterimanya nanti. Persepsi seseorang merupakan salah satu faktor yang mendukung seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Menurut Moeliono dalam Fahrudin (2012: 36) mendefinisikan partisipasi adalah “Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan”.

Pengertian Partisipasi menurut definisi diatas adalah keterlibatan seseorang atau kelompok secara sadar ke dalam interaksi sosial secara aktif pada suatu situasi tertentu karena alesan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok memahami suatu hal dalam pemikirannya melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.

Selain definisi tersebut, terdapat pula definisi partisipasi menurut Mubyarto (1985) dalam Fahrudin (2012: 37) yang mendefinisikan partisipasi adalah “Kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri”.

Berdasarkan definisi partisipasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu keterlibatan seseorang yang didasarkan karena adanya kesadaran dan juga pemikiran sehingga mendorong untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan dengan adanya rasa tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

**2. Manfaat Partisipasi**

Berbagai pengertian partisipasi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwasanya partisipasi merupakan suatu keterlibatan yang dilakukan dan juga tentunya diharapkan dapat bermanfaat dalam interaksi sosial di masyarakat. MenurutSuratmo (1992) dalam Fahrudin (2012: 41) Manfaat dari partisipasi yg akan dirasakan oleh masyarakat adalah :

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mengetahui dampak apa yang akan terjadi baik yang positif maupun yg negatif, dan cara menanggulangi dampak negatif yang akan dan harus dilakukan.
2. Masyarakat akan ditingkatkan pengetahuannya mengenai masalah lingkungan, pembangunan dan hubungannya, sehingga pemerintah dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya kepada pemerintah terutama masyarakat di tempat proyek yang akan terkena dampak.
4. Pemerintah mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat yang belum tahu atau tidak ada dalam laporan amdal, sehingga kebijaksanaan atau keputusan yg akan diambil akan lebih tepat, karena di dalam informasi tersebut sering pemerintah dapat menemukan masalah-masalah yang penting bagi masyarakat yg belum terekam dalam laporan amdal secara jelas terutama hal-hal yang tidak dapat dikuantitatifkan.
5. Apabila masyarakat telah mengetahui cukup banyak mengenal proyek tersebut termasuk dampak apa saja yang akan terjadi positif dan negatif dan usaha-usaha apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak negatif, sedang dari pihak pemerintah dan pemrakarsa proyek mengetahui pendapat-pendapat masyarakat serta keinginannya atau hal-hal apa yang diperlukan, sehingga salah paham atau terjadinya konflik dapat dihindari.
6. Masyarakat akan dapat menyiapkan diri untuk menerima manfaat yang akan dapat dinikmati dan apabila mungkin meningkatkan manfaat tersebut dampak positif dan ikut menekan atau mengahdirkan diri terkena dampak negatif.
7. Dengan ikut aktifnya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sejak tahap penyusunan andal, biasanya perhatian dan isntansi pemerintah yg bertanggung jawab dan pemrakarsa proyek pada masyarakat akan meningkat.

**3. Faktor-Faktor dalam Partisipasi**

Partisipasi yang terdapat dalam setiap orang tentunya terjadi dikarenakan adanya suatu persepsi ataupun pemikiran yang ada dalam dirinya. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor dalam partisipasi. Menurut sahidu (1998) dalam Fahrudin (2012: 44) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah :

1. Motif harapan
2. *Needs*
3. *Rewards*, dan
4. Penguasaan informasi.

Faktor yg memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah:

1. Pengaturan dan pelayanan
2. Kelembagaan
3. Struktur dan stratifikasi sosial
4. Budaya lokal
5. Kepemimpinan
6. Sarana dan prasarana.

Sedangkan untuk faktor yg mendorongnya adalah :

1. Pendidikan modal, dan
2. Pengalaman yang dimiliki.

Berdasarkan faktor-faktor partisipasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut terjadi karena adanya keinginan dari setiap orang untuk berubah dan menghasilkan tujuan yang diinginkan, selain itu faktor tuntutan juga merupakan suatu hal yang menyebabkan seseorang untuk dapat berpartisipasi dan juga didukung oleh adanya *rewards* yang akan didapatkan.

**4. Pendekatan Mengenai Partisipasi**

Partisipasi yang terdapat dalam masyarakat tentunya memiliki beberapa ketentuan-ketentuan sesuai dengan norma-norma maupun nilai-nilai yang berlaku. Menurut Bumberger dan Shams (1989) dalam Fahrudin (2012: 36) terdapat 2 pendekatan mengenai partisipasi, yaitu :

1. Partisipasi merupakan proses sadar tentang pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan dari masyarakat yang kurang beruntung berdasarkan sumber daya dan kapasitas yang dimilikinya.
2. Partisipasi harus mempertimbangkan adanya intervensi dari pemerintah dan lsm, disamping peran serta masyarakat. Hal ini sangat pentng untuk implementasi proyek yang lebih efisien mengingat kualitas sumber daya dan kapasitas masyarakat tidak memadai.